

PERANAN LURAH DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN SAMARINDA ULU (Studi Pada Organisasi Bhayangkara)¹

Agus Eko Prasetyo²

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Peranan Lurah dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu bersama Organisasi Sandi Bhayangkara menunjukkan bahwa peran Lurah dalam peningkatan komunikasi masyarakat melalui sarana ibadah sangat memberikan pengaruh yang baik dalam menjaga silaturahmi dengan masyarakat, peran Lurah dalam Peningkatan hubungan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga proses hubungan ke beberapa pihak sangat harmonis dan baik sedangkan dalam pelaksanaan program organisasi diatur melalui musrenbangkel sehingga koordinasi perangkat kelurahan dan masyarakat bisa sinergi dalam proses pembangunan terkait ketentraman dan ketertiban.

Kata Kunci : Peran, Ketentraman dan Ketertiban

Pendahuluan

Dewasa ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

¹ Materi artikel ini berasal dari artikel yang ditulis dari pengarang di atas (Agus Eko Prasetyo, Prodi IP Fisip Unmul).

² Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:agusekoip2007@gmail.com

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama Rasyid (1998:139). Paradigma penyelenggaraan Pemerintah telah terjadi pergeseran dari paradigm *rule governance* yang senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma *Good Governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada Pemerintah atau Negara saja tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi public (masyarakat).

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Bhata dalam nisjar (1997:119) adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikemukakan diatas menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada didalam masyarakat, segera bisa diwujudkan manakala Pemerintah didekatkan dengan yang diperintah.

Untuk itu diperlukannya sosok pemimpin yang handal dalam mengelola organisasi, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama, seorang pemimpin mempunyai kesempatan untuk mengubah jerami menjadi emas atau justru sebaliknya bisa mengubah tumpukan uang menjadi abu. Hubungan antara pemimpin dan mereka yang dipimpin bukanlah hubungan satu arah tetapi senantiasa harus terdapat adanya antar hubungan. Bahwa seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi kelompoknya, jelas karena apabila ia tidak mampu melakukannya maka berarti bahan ini tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik. Seorang pemimpin memimpin dan bukanlah memaksa. Pemimpin menarik pengikutnya hingga mencapai puncak prestasi menurut anggapan mereka semula tidak mungkin tercapai. Seorang pemimpin mengenal sifat-sifat individual pengikut-pengikutnya dan ia mengetahui kualitas-kualitas apa akan merangsang mereka untuk bekerja sebaik mungkin.

Ada 6 tugas yang harus diemban oleh lurah sebagai pemimpin organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 pasal 5 :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban hukum

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di kelurahan. Maka dari itu kemampuan seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Dewasa ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Kelurahan Sidodadi yang memiliki luas wilayah 237,8 ha dan memiliki jumlah penduduk 21.132 jiwa. Kelurahan Sidodadi merupakan daerah pusat kota dan komersil diantaranya pertokoan, pusat perbelanjaan, serta pemukiman padat penduduk. Dalam kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Kelurahan Sidodadi dibantu oleh perangkat organisasi keamanan yang berwadahkan forum kelembagaan yang lebih dikenal dengan sebutan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Namun dengan berjalannya waktu dan kepemimpinan periode selanjutnya, forum tersebut berubah nama menjadi "Sandi Bhayangkara".

Sandi Bhayangkara merupakan sebuah organisasi sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS). Selain itu Sandi Bhayangkara merupakan penghubung antara penegak hukum dan masyarakat umum. Organisasi ini berdiri berdasarkan Akta Notaris Rudiansyah, SH, M.K, nomor 4 tanggal 4 Maret 2010 dan langsung dibawahahi oleh Dewan Pelindung yaitu Walikota Samarinda serta Kapolresta Samarinda sebagai Dewan Penasehat Polri. Struktur organisasi Bhayangkara terdiri dari ketua umum, ketua harian, bendahara, sekertaris, ketua bidang hukum, ketua bidang humas, ketua

bidang organisasi, ketua bidang telematika, ketua bidang operasional serta koordinator wilayah. Antara lain wilayah Sambutan, wilayah Samarinda Ilir, wilayah Samarinda Utara, wilayah Sungai Kunjang, wilayah Samarinda Ulu, wilayah Samarinda Seberang dan Palaran.

Dalam forum organisasi Sandi Bhayangkara berkaitan dengan perangkat kelurahan sebagai penghubung dengan masyarakat. Kepemimpinan dalam kelurahan sangat diperlukan untuk menunjang agar forum organisasi ini berjalan seimbang dan berkesinambungan. Lurah sangat berperan serta sebagai dewan penasehat bagi forum organisasi Sandi Bhayangkara di wilayah masing-masing.

Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah Bagaimana peranan Lurah bersama organisasi Sandi Bhayangkara dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidodadi? dan Apa faktor pendukung dan penghambat Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidodadi?. Dan mengetahui tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Kelurahan Sidodadi Secara praktis sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya aparatur pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, instansi terkait serta pihak *stake holder* yang ingin mencari referensi tentang sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Kerangka Dasar Teori

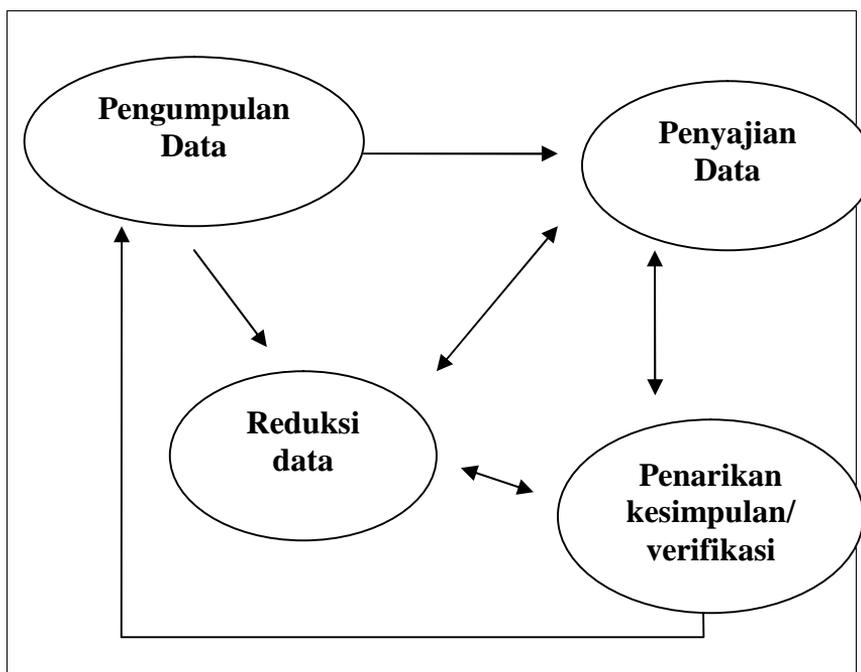
Metode Penelitian

Menurut Nawawi (1998 : 9) mengatakan sebagai “metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian seseorang lembaga masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan Peranan Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Bersama Organisasi Sandi Bhayangkara di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga mendapatkan fokus penelitian: Peranan Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidodadi bersama Organisasi Sandi Bhayangkara adalah sebagai berikut: Peningkatan komunikasi masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban, Peningkatan hubungan harmonis masyarakat untuk pencapaian kamtibmas, Pelaksanaan program Organisasi terkait Ketentraman dan Ketertiban. Serta Faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidodadi bersama Organisasi Sandi Bhayangkara.

Teknis analisis data menggunakan teknik Maththew B. Miles dan Michael Huberman, (1997:15-20), yang terdiri dari 4 komponen, berikut penjelasannya : Pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan dengan beraneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis, Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transpormasi data “kasar“ yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan, Penyajian data yaitu penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan pemeriksaan kesimpulan, Penarikan kesimpulan yaitu meliputi pemberian makna data yang lebih sederhana dan disajikan dalam pengujian data-data dengan mencatat keteraturan pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hokum-hukum empiris.

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman 2007, Analisis Data Kualitatif.

Adapun penjelasan dari gambar analisis data dan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Collection Data*)

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)
3. Penyajian Data (*Display Data*)
4. Menarik Kesimpulan (*Conclution Drawing/ Verifying*)

Hasil Penelitian

Peranan Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu (Studi Pada Organisasi Sandi Bhayangkara)

Kelurahan Sidodadi merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Camat Kecamatan Samarinda Ulu, dengan wilayah seluas 237,8 Ha. Jumlah penduduk Kelurahan Sidodadi sebanyak 22.925 jiwa dengan kepadatan penduduk berkisar 103 jiwa/ km². Karakter iklim Kelurahan Sidodadi dengan suhu udara rata-rata 20° C- 32° C dengan curah hujan rata-rata 15 mm/tahun. Dalam perkembangan kelurahan yang terjadi tersebut, maka akan mempengaruhi pula pada struktur organisasi yang ada di kelurahan, karena stuktur organisasi merupakan suatu susunan mekanisme kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Di dalam organisasi dapat dikatakan dengan jelas seperti susunan tingkat unit-unit dan tingkatan jabatan, disamping itu juga menjelaskan tentang pembagian tugas dan tata hubungan dari masing-masing unit atau bidang tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kelurahan Kota Samarinda, Kelurahan merupakan unsure pelaksana teknis kewilayahan dalam Kecamatan Daerah Kota Samarinda. Adapun tugas pokok Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah “Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Samarinda sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas”.

Peningkatan Komunikasi Masyarakat Dalam Membantu Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

Interaksi komunikasi yang terjadi dalam masyarakat melibatkan berbagai aspek misalnya pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lain-lain. Khususnya tindakan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial hal keamanan pada dasarnya merupakan masalah semua manusia. Karena tidak ada satu manusiapun yang dapat terbebas dari penyakit sosial ini. Namun, terkadang ada beberapa orang yang kurang memperhatikan keamanan

sehingga menimbulkan berbagai masalah yang timbul bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya. Masalah K3 juga dapat timbul dari faktor ketentraman (*agent*) yang dapat menyebabkan seseorang menjadi terteram. Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli dalam bidang K3, yang dapat membawa masyarakat ke hidup yang lebih aman.

Masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pihak berkepentingan yakni organisasi Sandi Bhayangkara dalam meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terdapat masalah yang mendasar yakni segi anggaran yang telah disediakan pihak Kelurahan sehingga proses komunikasi ini dilakukan secara bertahap dan tidak intensif, ini berarti proses komunikasi hanya bersifat tindakan saja bukan bersifat pencegahan karena komunikasi yang diberikan ke masyarakat di lingkungan Kelurahan Sidodadi masih menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.

Prinsip yang kedua menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi khususnya Lurah Sidodadi. Dalam bidang K3, seorang aparatur harus paham dengan apa yang dilakukan masyarakat, karena mereka memiliki *body language*. Misalnya, disaat menyampaikan informasi kondisi seseatu, seorang aparatur harus dapat melihat respon mereka. Apakah mereka senyum, atau diam saja, atau malah menunjukkan muka yang kurang sedap. Dengan demikian dapat diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan. Misalnya jika *respon audience* hanya diam saja atau menunjukkan respon yang kurang baik seperti menggerutu, bicara sendiri atau memandang dengan tatapan sinis, mungkin cara penyampaian informasi harus diubah. Menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efektif.

Prinsip yang selanjutnya menyatakan bahwa komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana cara menyampaikan suatu pesan. Ada kalanya satu pesan artinya sama, namun karena cara menyampaikannya berbeda, pesan tersebut dimaknakan berbeda pula. Contohnya dalam bidang K3 adalah proses penyampaian informasi kondisi lapangan kepada anak kecil dan orang dewasa. Seorang aparatur harus dapat membedakan pesan kepada anak kecil dan orang dewasa. Misalnya, “adek, jangan buang sampah sembarangan”, akan berbeda artinya dengan, “bapak, jangan buang sampah sembarangan”. Anak kecil akan menanggapi perkataan itu mungkin dengan biasa saja dan mengikuti perintah tersebut yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Namun, orang dewasa atau bapak-bapak akan menanggapi pesan itu mungkin dengan perasaan negatif. Mungkin merasa dirinya dianggap kurang disiplin dan dianggap seperti anak kecil. Sehingga si penyampai informasi tersebut akan dianggap kurang sopan. Dengan demikian, seorang aparatur harus

memperhatikan cara penyampaian pesan. Jangan sampai menimbulkan salah persepsi pada masyarakat.

Komunikasi juga berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Hal ini juga termasuk dalam prinsip komunikasi. Kadang seseorang bermaksud untuk tidak melakukan komunikasi, namun orang lain menganggapnya melakukan komunikasi. Inilah yang dimaksud komunikasi yang tidak disengaja. Sedangkan komunikasi yang disengaja, merupakan komunikasi yang real, dimana adanya timbal balik yang jelas antara komunikator dan komunikan. Prinsip ini juga penting dalam bidang K3 Kelurahan Sidodadi. Misalnya, seorang Lurah atau aparaturnya ialah menjalankan kegiatan “sebelum makan selalu mencuci tangan”. Dan hal tersebut diamati oleh seorang masyarakat yang kebetulan memang memiliki hubungan yang dekat. Pada awalnya, kegiatan mencuci tangan ini merupakan bentuk rutinitas yang memang sudah biasa dilakukan sang aparaturnya Kelurahan. Namun tanpa sengaja, masyarakat yang mengamatinya menjadi terpengaruh untuk meniru kegiatan tersebut. Dengan demikian, hendaknya kesengajaan ini terjadi dalam hal-hal positif yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Keseluruhan elemen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berjalan dengan sebagaimana mestinya namun proses dalam peningkatan komunikasi politik melalui agenda yang telah ditetapkan masih dilakukan secara bertahap dan tidak intensif (terjadwal dan dilakukan) karena anggaran untuk penyelenggaraan komunikasi ke masyarakat masih minim sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan demi menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sidodadi.

Peningkatan Hubungan Dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Menjaga hubungan dengan beberapa pihak berkepentingan seperti pihak swasta, pihak pendidikan, pihak keamanan, pihak pemerintahan serta pihak organisasi masyarakat yang peduli terhadap ketentraman dan ketertiban dalam suatu wilayah di Kelurahan Sidodadi. Sebagai bentuk kepedulian antar pemerintahan Kelurahan Sidodadi dan Organisasi Masyarakat serta hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Peran Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, secara garis besar Lurah mempunyai peran yang sangat penting yakni melaksanakan pembinaan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangannya, melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat di wilayah kelurahan dan melaksanakan pembinaan fasilitas terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara

ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan serta menjadi penegak pelaksanaan PERDA keputusan Walikota Samarinda serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kelurahan.

Proses peningkatan hubungan dalam ketentraman dan ketertiban bisa dilaksanakan dengan preventif dan represif sehingga pola hubungan yang terjalin dengan beberapa pihak sangat membantu melengkapi komponen yang kurang sehingga proses peningkatan ketentraman dan ketertiban bisa berjalan aman dan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama. Dengan adanya peningkatan produk hukum seperti undang-undang sampai peraturan walikota dalam proses menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada bisa memberikan efek jera siapa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di sidodadi, langkah-langkah terstruktur sejatinya bisa menjaga hubungan yang baik dengan beberapa pihak bisa dilakukan melalui sarana seminar pemuda, dialog masyarakat melalui RT dan diskusi ringan terkait keamanan daerah, ini bermaksud untuk mencari kembali pihak-pihak mana saja yang akan di rangkul dan di jadikan kekuatan dalam proses peningkatan hubungan dalam ketentraman dan ketertiban.

Sebagai pihak terkait, organisasi Sandhi Bhayangkara haruslah bisa memproses adanya peningkatan hubungan dalam ketentraman dan ketertiban, namun proses teori dalam pelaksanaan dinilai sangat sulit diaplikasikan karena menjaga hubungan itu sulit, disatu sisi kita selalu memberikan wacana namun pihak kelurahan sering mengaplikasikan secara lain sehingga dalam pemberian informasi dalam hal peningkatan hubungan ke masyarakat dalam proses menjaga ketentraman dan ketertiban bisa berbeda, ini berkaitan dengan metode pelaksanaan bisa berbeda dengan apa yang akan dilaksanakan walaupun tujuan yang dilakukan ialah memakai prinsip yang sama yakni saling menjaga hubungan dalam hal ketentraman dan ketertiban yang terjalin dalam lingkungan Kelurahan Sidodadi yang aman. Penjelasan peningkatan hubungan ini sangat besar fungsinya karena hasil akhir adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat, suatu contoh permasalahan etnis suku tertentu dipastikan pihak berkepentingan bisa memfasilitasi masalah yang ada sehingga rasa percaya menjaga konflik bisa lebih mudah di pahami secara bijak dan tidak membuat rasa tegang terus menerus.

Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada Lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, menjalin hubungan ke masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan

aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Lurah dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar ketentraman dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh aparaturnya untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa tenteram sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa tertib sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Pelaksanaan Program Organisasi terkait Ketentraman dan Ketertiban

Lurah mempunyai program organisasi menyesuaikan undang-undang yang berjalan baik penyelenggaraan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sehingga produk hukum yang ada dimaksudnya untuk dilaksanakan dan ditaati dengan sebagaimana mestinya, begitu pula pelaksanaan program organisasi terkait ketentraman dan ketertiban sudah tertuang dalam bab diatas sehingga penjabarannya lebih menekankan pembinaan, membimbing, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya sebagai pelayan bagi masyarakat serta menjalankan kerjasama dengan beberapa pihak yang turut andil menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sidodadi. Namun ada program khusus yang dijalankan yaitu Pelanggaran Hukum, Kenakalan Remaja dan Perilaku Seksual Pra Nikah.

Program-program Organisasi Sandi Bhayangkara adalah pertama menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, ikut serta menjaga perdamaian dan kertertiban ditengah masyarakat luas yang memerlukan pertolongan, misalnya: bencana alam, kami sebagai anggota dan pengurus merasa terpanggil ikut serta mengamankan harta benda dan jiwa. Kedua, bahaya kebakaran yg paling sering terjadi dilingkungan masyarakat, membantu pemadaman dan mengatur lalu lintas jalan demi kelancaran

bersama. Ketiga, bahaya narkoba, sandi bhayangkara bersama-sama masyarakat ikut memberantas narkoba yg selama ini sering terjadi dilingkungan masyarakat demi terciptanya rasa aman.

Program organisasi Kelurahan Sidodadi adalah Program yang terstruktur menyesuaikan kebutuhan situasi dan kondisi yang berkembang dimasyarakat sehingga masalah yang menjadi pertayaan-pertanyaan dari warga dapat dijawab dengan tepat oleh pihak pengelola masyarakat yakni pihak Kelurahan, sesuai dengan apa yang diberikan negara ialah menyepakati program rencana daerah yang berjalan bisa dilaksanakan serentak dengan beberapa daerah tanpa harus meninggalkan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Hanya saja proses yang terjadi dalam pembangunan seperti menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat sangatlah berbeda dengan yang direncanakan, ini dikarenakan adanya perubahan mendasar suatu penanganan sosial dalam proses perbaikan, maka dari itu pihak Kelurahan selalu bersinergi dengan beberapa pihak lain seperti kepolisian, masyarakat, organisasi massa dan lain sebagainya dalam melaksanakan kegiatan yang disepakati untuk terus menjaga ketentraman dan ketertiban sesuai ranah kegiatan yang dilakukan.

Pelaksanaan program kerja organisasi bisa lebih disatukan sehingga proses tindak lanjut ke masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan sidodadi dapat lebih baik dan cepat dalam bertindak serta menyesuaikan anggaran / dana yang membuat administrasi keuangan kelurahan sehat. Penjelasan kali ini menyesuaikan dengan Teori Agenda-setting (Mc Combs dan DL Shaw : 1972) asumsi teori ini adalah bahwa jika anggaran memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka anggaran itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting dalam mekanisme anggaran, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini anggaran diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sidodadi Bersama Organisasi Sandi Bhayangkara

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa faktor tersebut, antara lain : Fasilitas Penunjang. Dalam konsep fasilitas, sebuah perlengkapan sumber daya manusia ialah adanya alat-alat peraga guna memberikan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan kinerja dalam mengatasi semua permasalahan. Di dalam melaksanakan program-program Kelurahan agar mendapatkan hasil yang optimal, sudah tentunya harus didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai selain SDM yang baik pula.

Adapun fasilitas penunjang yang ada di Kelurahan Sidodadi antar lain: Bidang Umum, Lapangan Sepakbola dan Jalan sebagai salah satu alat transportasi di Kelurahan Sidodadi memiliki kondisi yang cukup baik mengingat Kelurahan Sidodadi dilalui oleh rute jalan propinsi yang menghubungkan Kota Madya Samarinda dan Kota Bontang. Kebijakan Peraturan yang diberlakukan Dalam usaha mencapai tujuannya, proses pelaksanaan bidang K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban) di Kelurahan Sidodadi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman produk hukum guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 7/1983, Kelurahan adalah organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh Pemerintah, untuk memelihara dan melestarikan nilai nilai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Kegotongroyongan dan Kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

Sedangkan faktor penghambat meliputi Dana yang dianggarkan terbatas seperti yang telah diketahui, bahwa anggaran Samarinda pada saat ini mengalami penurunan akibat sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 hanya 268 Milyar padahal tahun sebelumnya yakni tahun 2012 mencapai 271 Milyar, permasalahan ini juga berpengaruh terdapat mata anggaran yang dimiliki oleh pihak kelurahan guna membiayai seluruh belanja operasional kelurahan. Kurangnya Sarana dan Prasarana pelayanan. Fasilitas merupakan penunjang kegiatan bagi pelaksanaan administrasi sekretariat yang dilaksanakan oleh aparat Kelurahan Sidodadi serta Organisasi Sandi Bhayangkara. Dengan adanya fasilitas kerja yang kurang memadai, tentu akan menghambat kegiatan administratif di Kelurahan Sidodadi termasuk didalamnya dalam pelayanan kepada masyarakat luas.

Penutup

Dari penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yakni Peran Lurah dalam Peningkatan komunikasi masyarakat dalam membantu menjaga ketentraman dan ketertiban melalui sarana ceramah di masjid tahlilan dan adanya rembug warga. Pelaksanaan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya namun proses dalam peningkatan komunikasi politik melalui agenda yang telah ditetapkan masih dilakukan secara bertahap dan tidak intensif (terjadwal dan dilakukan) karena dana atau anggaran untuk penyelenggaraan komunikasi ke masyarakat masih minim dan kecil sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan demi menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sidodadi. Peran Lurah dalam Peningkatan hubungan dalam peningkatan ketentraman

dan ketertiban berjalan dengan sepihak artinya ada beberapa pihak mempunyai prinsip peningkatan menjaga hubungan hanya saja metodenya berbeda. Namun pelaksanaan metode tersebut tidak mengubah dan merusak hubungan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sidodadi, sehingga peran lurah masih bersifat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik, pembinaan dan sosialisasi K3 dan partisipasi Kelurahan dalam agenda pembangunan daerah. Pelaksanaan program organisasi terkait ketentraman dan ketertiban bisa lebih disatukan sehingga proses tindak lanjut ke masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan sidodadi dapat lebih baik dan cepat dalam bertindak serta menyesuaikan anggaran / dana yang membuat administrasi keuangan kelurahan sehat. Peran lurah dalam proses pelaksanaan program diatur melalui musrenbangkel sehingga koordinasi perangkat kelurahan dan masyarakat bisa sinergi dalam proses pembangunan terkait ketentraman dan ketertiban. Faktor pendukung meliputi fasilitas penunjang seperti bidang umum, lapangan sepakbola, jalan dan transportasi dan adanya kebijakan peraturan yang diberlakukan menunjang program yang diberlakukan sedangkan faktor penghambat meliputi dana yang dianggarkan untuk program K3 terbatas serta kurangnya pelengkap sarana dan prasarana pelayanan meliputi mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah, komputer, handy talky, wireless, toak dan hal lainnya

Saran

Penelitian ini menyarankan kepada pihak yang mungkin dapat digunakan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan bidang K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban) yaitu perlu adanya tindakan tegas dari pihak Lurah mengenai penambahan pos keuangan khusus bidang K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban) kepada masyarakat sehingga semua permasalahan bisa diantisipasi dengan cepat karena adanya dana yang dinilai cukup untuk menjadi pioner keselamatan dalam penyelenggaraan K3. Adanya persoalan dalam hal sarana dan prasarana yang mudah digunakan dan baik, karena sumber daya manusia tidak akan bisa membantu jika peralatan yang disiapkan masih dikategorikan tidak layak, sehingga membuat bahaya pengguna peralatan. Hendaknya dalam kegiatan rapat/musyawarah maupun kunjungan lapangan ke rumah warga, pihak Kelurahan Sidodadi lebih dapat mensosialisasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan program dari pada proses penyelenggaraan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan K3 yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan dapat dimengerti oleh warga masyarakat, dan dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik pula.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharismi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badudu-Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Hardjito, Dydiet, 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hasibuan, Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Helmi, Masdar. 2003. *Dakwah dalam Alam Pembangunan*. Semarang: Toha Putra
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hal.7
- Karhi, Nisjar. 1997. *Beberapa catatan tentang Good Governance, dalam jurnal administrasi dan pembangunan, vol. 1 No. 2*.
- Komaruddin. 1994. *Konsep tentang Peran Eksiklopedia Manajemen*
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia
- Meleong, 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Muslimin, Amrah. 1998. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Poerwadarminta, WJS. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rasyid, Ryass. 1998. *Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan administrasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES
- Rivai, Veinthal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Rajasa Grafindo Persada
- Singarimbun, M. dan Effendi S. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Indonesia
- Siswanto, Joko. 2003. *Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: CV Rajawali
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suhartono, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Spektrum Pemikiran. Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)
- Suradinata, Ermaya. 2002. *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Vidcodata
- S.P Siagian. 1997. *Filsafat administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Syakur, Nasrul. 2011. *Manajemen Organisasi*. Bandung : Citapustaka Media Perintis

- Toha, Miftah. 2005. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- W.J.S, Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Sumber Internet :

- <http://dspace.widyatama.ac>. Google, diakses 10 November 2009
- Soerjono, Soekanto. (2002 : 234), (Online) (<http://dspace.widyatama.ac>., diakses 10 November 2009)
- Wikipedia, 2013. Lurah (Online). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah>, diakses 20 Desember 2013)
- Wikipedia, 2013. Organisasi (Online). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, diakses 20 Desember 2013)